



SUMBER BERITA

JUMAT, 27 JULI 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kades Kuasi DD Rp. 170 Juta

KOTA MANNA, BE - Dana peruntukannya. Pasalnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Hamdan Sarbaini SSos. Desa (DD) dan Alokasi Dana masih dikuasai Kepala Desa Masyarakat Desa (DPMD) Hamdani mengatakan, ad- Desa (ADD) Desa Keban (Kades) setempat. "Dana Bengkulu Selatan (BS), anya dugaan dana yang tak Agung 3, Kedurang hingga yang masih dikuasai Kades jelas peruntukan tersebut, saat ini sebagian belum jelas sebesar Rp 170 juta," kata Kabid Pemerintahan Desa, setelah pihaknya mendapat

informasi dari Kecamatan Kedurang. Atas informasi tersebut, pihaknya langsung memanggil Kades, Ketua BPD, bendahara desa dan bagian keuangan desa.

"Ketua BPD dan Bendara desa hadir, keduanya membenarkan adanya dana yang dikuasai Kades, hanya saja Kades dan Kaur Keuangan tidak pernah hadir," ujarnya.

Hamdani membeberkan, dari keterangan Ketua BPD setempat, dan bendahara desa setempat, diketahui penarikan dana sebesar Rp 170 juta tersebut rinciannya Rp 140 juta DD dan Rp 30 juta ADD pada 8 Juni 2018. Anehnya pencairan dana tersebut hanya berdasarkan tanda tangan dari bagian keuangan desa tanpa tanda tangan sekretaris desa. Saat ditanya, Kades mengatakan akan mengembalikan dana tersebut ke kas desa pada 26 Juni. Akan tetapi hingga

saat ini belum juga dikembalikan, bahkan belum juga dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Padahal dana yang dicairkan itu, untuk pembelian alat tulis kantor desa, honorer para guru PAUD dan juga kegiatan pembangunan.

"Sampai saat ini belum jelas keberadaan uang itu, bahkan Kades tidak diketahui keberadaannya sebab setiap kali dipanggil tidak pernah datang," imbuhnya.

Atas kejadian ini, sambung Hamdan pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Inspektorat BS bahkan dengan pihak kejaksaan BS. Oleh karena itu, dirinya berharap permasalahan dana yang dikuasai Kades ini dapat segera selesai. Bahkan jika tidak, dirinya meminta aparat penegak hukum dapat memprosesnya secara hukum.

"Dana itu milik desa bukan pribadi, kami masih berharap yang bersangkutan

dapat mengembalikannya ke kas desa, jika tidak kami minta aparat penegak hukum dapat memprosesnya secara hukum," demikian Hamdan.

Sementara itu, Kajari BS, Rohayatie SH MH mengimbau agar para kepala desa dapat menggunakan DD untuk kemakmuran warga. Dirinya berharap, agar pengelolaan DD tidak menyimpang dari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Bahkan dirinya mengaku Kajari BS siap membentuk dan memberikan bimbingan kepada para kepala desa dalam pengelolaan DD agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

"Jangan sampai karena DD para Kades masuk penjara, kami siap memberikan bimbingan, namun jika terjadi penyimpangan, tentu kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Rohayatie. (369)